



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

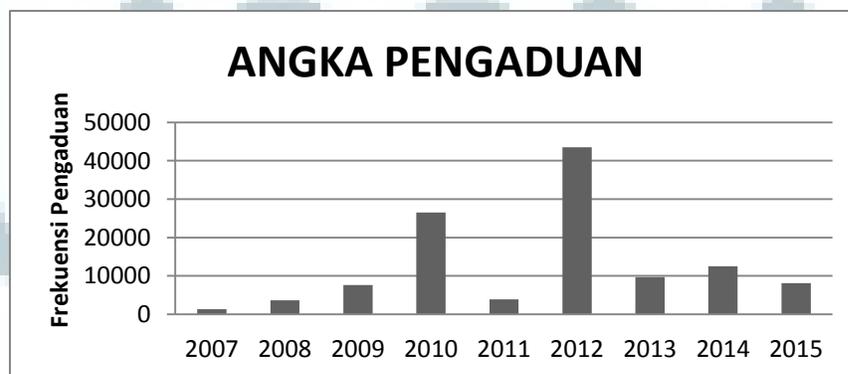
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan oleh lembaga penyiaran (Rosarians, 2014, para. 4). Kendati mengalami pasang surut, pelanggaran lembaga penyiaran atas standar penyiaran tidak pernah benar-benar hilang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merilis dalam lamannya tentang perkembangan jumlah aduan pelanggaran yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2007 misalnya, KPI mendapatkan pengaduan terkecil sebanyak 1.335 aduan. Angka aduan tersebut mengalami kenaikan di tahun-tahun setelahnya. Pada 2012, KPI menerima jumlah pengaduan terbesar yang mencapai 43.470 aduan. Jumlah ini merupakan jumlah pengaduan terbesar yang diterima KPI selama berdiri. Adapun pada tahun sebelum dan setelahnya, secara berturut jumlah pengaduan tertera pada grafik berikut.

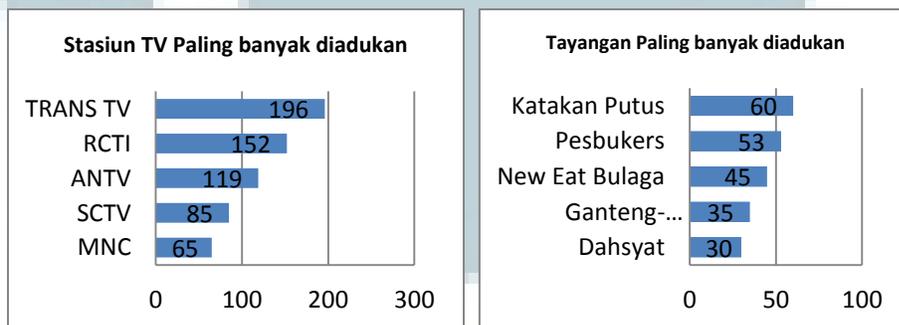
**Grafik 1.1**  
Angka Pengaduan yang Diterima KPI



Sumber: Refleksi Akhir Tahun KPI Pusat (2007-2015)

Selain KPI, Remotivi yang merupakan lembaga pusat kajian media dan komunikasi juga merilis sejumlah tayangan televisi yang paling banyak dilaporkan sepanjang 2015. Pelaporan tersebut terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan privasi publik dan perilaku kekerasan di dunia pertelevisian. Menurut Yanuar (2016, para. 2), Rapotivi (aplikasi android untuk mengadukan tayangan televisi bermasalah yang dibuat Remotivi) telah menerima 1.107 aduan dari 2.655 pengguna aktif. Dari ribuan aduan tersebut, sebanyak 853 aduan yang terverifikasi mengacu pada pelanggaran akan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

**Gambar 1.1**  
Hasil Aduan Rapotivi



Sumber: remotivi.or.id

Rachmat (2015, h. 56) dalam penelitian yang berjudul “*Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*”, memaparkan bahwa terdapat ketidaksamaan perspektif antara KPI dan lembaga penyiaran membuat pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi.

Kasus pelanggaran lainnya juga dapat dilihat dari penelitian yang dibuat oleh Tulasi (2014) terkait dengan pelanggaran aturan pornografi yang dilakukan oleh seorang pembawa acara di TransTV. Dalam penelitiannya, Tulasi meninjau pelanggaran terjadi karena pembawa acara tersebut melakukan hal-hal yang merujuk pada sensualitas. Hasil wawancara dengan pihak TransTV dan KPI, Tulasi (2014, h. 421) menyimpulkan bahwa salah satu alasan pelanggaran terjadi karena kurang pemahamannya pekerja media (baik yang di belakang layar maupun yang di depan layar) akan nilai-nilai pedoman pelaku penyiaran. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Hal tersebut disebabkan dua hal. Pertama, *host* program memahami isi pedoman perilaku penyiaran namun mengabaikannya demi mengejar target kenaikan *rating*. Kedua, *host* program tidak memahami nilai-nilai pedoman perilaku penyiaran karena tidak pernah membacanya atau tidak pernah mengetahuinya. Hal ini dapat melahirkan reaksi publik yakni, mempertanyakan peran manajemen KPI yang tidak berupaya menanamkan nilai-nilai P3-SPS kepada manajemen televisi dan terutama kepada produser beserta *host* program (Tulasi, 2014, h. 421).

Pelanggaran terjadi tidak hanya pada program non-jurnalistik, program jurnalistik juga tidak lepas dari pelanggaran. “Berita Bom Sarinah, Delapan Media Dijatuhi Sanksi Oleh KPI” (2016, para. 2) menyatakan bahwa pelanggaran terjadi terkait dengan penggambaran korban meninggal yang ditampilkan berulang tanpa *blur* pada siaran program di masing-masing stasiun televisi. Hal ini membuat delapan media dijatuhi sanksi oleh KPI, karena tidak sesuai dengan pedoman dan standar program siaran yang ada.

Pelanggaran-pelanggaran yang ada tidak hanya terjadi sekali namun terjadi berulang (“Siaran Televisi Lakukan Pelanggaran Berulang”, 2012, para. 1). Menurut Sujarwanto Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat Periode 2016-2019), hal ini terjadi karena pemahaman praktisi mengenai P3SPS di kalangan pekerja lembaga penyiaran masih kurang (“KPI Bentuk Sekolah Etika Pedoman Penyiaran”, 2015, para. 2). Banyak pelanggaran berulang terjadi karena kurangnya pemahaman tentang P3SPS, baik di kalangan jajaran awak redaksi maupun pengusaha pemilik media (“Selain JakTV dan O Channel, Elshinta TV Juga Kena Peringatan”, 2013, para. 2). Padahal, P3SPS adalah bentuk perlindungan negara terhadap publik dalam ranah penyiaran. Pedoman tersebut dibuat untuk menjamin masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, sehat, layak, dan benar. Maka dari itu, pedoman tersebut wajib dipahami dan diterapkan oleh pelaku penyiaran dalam program siarannya. Nilai-nilai yang dimuat dalam P3SPS belum sepenuhnya terinternalisasi dalam lembaga penyiaran itu sendiri (Romaria, 2016, h. 54).

Maka dari itu, untuk mengurangi adanya pelanggaran pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari aspek regulasi, kebijakan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), konten, hingga dampak siaran televisi merupakan hal yang harus menjadi perhatian publik maupun pemerintah hingga saat ini (Darwis, 2016, para. 1).

Banyaknya pelanggaran, kurangnya pemahaman pekerja media akan standar program siaran, dan ditambah dengan ‘pembenahan’ dari hulu ke hilir yang harus

segera dilakukan, membuktikan bahwa peran KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Undang-Undang Penyiaran Pasal 8 Ayat (3) menjelaskan tugas dan kewajiban KPI sebagai regulator lembaga penyiaran. Salah satunya adalah menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Menurut Judhariksawan (Mantan Ketua KPI Pusat Periode 2013-2016), secara tidak langsung KPI memiliki tugas untuk memastikan bahwa insan penyiaran, kompeten dan memahami arah, teknis, dan regulasi penyiaran di Indonesia (ISL, 2015, para. 1).

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk aplikasi KPI dalam menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, KPI membuka bimbingan teknis Sekolah P3SPS pada Mei 2015. KPI sepenuhnya sadar, bimbingan teknis untuk pelaku penyiaran merupakan upaya untuk dapat membumikan nilai-nilai P3SPS dalam tataran yang paling teknis dan implementatif merupakan hal yang penting. Terbentuknya Sekolah P3SPS ini juga sebagai bentuk ikhtiar dalam menyamakan persepsi, pemahaman, sudut pandang, intepretasi, dan implementasi di lapangan akan nilai-nilai P3SPS (Romaria, 2016, h. 55).

Sekolah P3SPS diselenggarakan hampir di setiap bulan dengan jumlah peserta yang ditentukan oleh KPI berkisar 25-30 orang. Para peserta terdiri dari praktisi lembaga penyiaran, mahasiswa dan juga masyarakat umum. Hingga April 2017, Sekolah P3SPS sudah meluluskan sebanyak 18 angkatan dari sejak pertama kali sekolah tersebut dimulai. Pelaksanaannya dilakukan di kantor KPI Pusat Jakarta, dengan target penyelesaian kurikulum dan materi selama tiga hari. Dua hari pertama

diisi dengan paparan materi, sedangkan hari terakhir peserta akan diberikan ujian dan diskusi yang akan dipresentasikan untuk dibahas bersama. Tidak menutup kemungkinan pula Sekolah P3SPS dapat dilaksanakan di daerah lain, sesuai dengan kebutuhan dan agenda kerja KPI.

**Gambar 1.2**  
Suasana Sekolah P3SPS



Sumber: Galeri KPI

Namun, apakah penyelenggaraan Sekolah P3SPS yang sudah cukup lama berlangsung sudah memenuhi tujuan dan harapan utama penyelenggaranya? Pertanyaan tersebut tentunya tidak mudah untuk dijawab. Faktanya, kendati sudah berlangsung hingga 18 angkatan, masih banyak pelanggaran yang terjadi dan berulang hingga saat ini. KPI belum melakukan evaluasi untuk mengukur dampak dari pelatihan yang dibuatnya. Yusuf (Ketua Kelas Sekolah P3SPS), menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan, hanya evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di akhir penyelenggaraan terkait dengan kendala teknis. Sedangkan menurut Herdianti (2012, h. 4), untuk mendapatkan sistem pelatihan yang tepat guna memenuhi tujuan adanya pelatihan tersebut, setiap pelatihan senantiasa harus dilakukan evaluasi. Titik lemah

dalam penyelenggaraan pelatihan seringkali ada dalam tahap evaluasi, karena evaluasi yang dilakukan tidak mencakup pada evaluasi dampak pelatihan.

Mengingat bahwa pentingnya evaluasi dalam sebuah program pelatihan, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian evaluatif terhadap program Sekolah P3SPS dengan menggunakan model evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) yang dikemukakan oleh Donald. L. Kirkpatrick. Selain pertimbangan praktis di atas, penelitian evaluatif ini dilakukan karena minat akademisi terhadap penelitian evaluatif terkait dengan program pelatihan etika media di Indonesia baik di dalam universitas maupun di luar universitas masih belum pernah dilakukan. Hal ini terbukti dari sulitnya pencarian penelitian sejenis terdahulu yang dicari oleh peneliti sebagai sumber referensi.

Model evaluasi yang dikembangkan Donald L. Kirkpatrick ini merupakan model evaluasi yang biasa digunakan evaluator dalam mengevaluasi program pelatihan SDM dan juga merupakan model evaluasi yang secara luas diterima dan digunakan, karena sederhana, lengkap, dan jelas untuk dilakukan. Selain itu, model evaluasi Kirkpatrick ini dipilih karena tahapan evaluasi yang dikemukakan sesuai dengan tujuan evaluasi pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Terdiri dari empat level evaluasi yang meliputi level pengetahuan, level pembelajaran, level perilaku, dan level hasil, masing-masing level merupakan hal yang penting dan berdampak bagi level setelahnya. Semakin meningkat levelnya, maka akan semakin sulit dan semakin menghabiskan banyak waktu (Kirkpatrick & James, 2006, h. 21). Namun dari empat level evaluasi yang ada, peneliti hanya akan melakukan evaluasi pada level pertama

dan kedua yaitu pada level reaksi dan level pembelajaran yang termasuk di dalamnya penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan perubahan sikap (Kirkpatrick & James, 2006, h. 22).

Pembatasan penelitian ini dilakukan karena beberapa faktor. *Pertama*, waktu penelitian tidak sesuai dengan waktu untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa semakin tinggi level evaluasi yang dilakukan akan semakin banyak waktu yang diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan evaluasi level ketiga dan keempat evaluasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Diperlukan waktu untuk melihat perubahan perilaku apa yang dapat terjadi oleh masing-masing peserta pelatihan. Sementara pada level satu dan dua evaluasi dapat dilakukan dan dilihat secara langsung.

*Kedua*, Kirkpatrick & James (2006, h. 23) menyatakan bahwa untuk melihat perubahan perilaku (level tiga), diperlukan empat keadaan yang harus terpenuhi. *Pertama*, peserta harus memiliki keinginan untuk berubah. *Kedua*, peserta harus mengetahui apa yang harus diubah dan bagaimana cara mengubahnya. *Ketiga*, peserta harus berada pada keadaan kerja yang mendukung. *Keempat*, peserta harus diberikan penghargaan karena melakukan perubahan. Dari apa yang dikemukakan di atas, keadaan pertama dan kedua dapat terpenuhi karena isi materi pelatihan yang dilalui peserta memaparkan dan menjelaskan apa yang dikonsepskan pada keadaan pertama dan kedua tersebut, sedangkan dua keadaan sisanya tidak. Sehingga, karena tidak terpenuhinya dua dari empat syarat yang dikemukakan sebelumnya, pembatasan penelitian hanya pada dua level pertama ini dilakukan.

Keadaan ketiga sulit terpenuhi karena peserta Sekolah P3SPS terdiri dari kalangan yang beragam (berbagai lembaga penyiaran dan juga berbagai divisi). Peserta terdiri dari berbagai macam kalangan seperti pekerja media televisi, pekerja media radio, mahasiswa, pengamat yang juga terdiri dari berbagai macam lembaga penyiaran dan divisi yang berbeda-beda seperti produser, *reporter*, *camera person*, *video editor*, *quality control officer*. Keadaan ini membuat sulit, karena skala pengukuran untuk masing-masing divisinya berbeda satu sama lain sehingga pengamatannya pun sulit untuk dilakukan.

Lalu, keadaan keempat sulit dicapai karena untuk dapat memberikan penghargaan sebagai hadiah dari perubahan, baik dari tim yang membuat pelatihan dan juga perusahaan yang memiliki kepentingan untuk membuat pelatihan tersebut harus terjalin hubungan kerjasama. Dan dalam hal ini adalah KPI sebagai penyelenggara pelatihan dan juga masing-masing lembaga penyiaran yang membutuhkan pelatihan. Pemenuhan keadaan ketiga dan terutama keempat perlu dibantu oleh kesadaran masing-masing lembaga penyiaran yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk lanjutan dari pelatihan yang dilakukan karena pelatihan tidak dapat dilakukan setiap saat dan KPI tidak dapat mengontrol setiap hari, sehingga bantuan dari masing-masing lembaga penyiaran diperlukan untuk mengawasi dan melihat perkembangan bersama.

Jika level ketiga tidak dapat terpenuhi maka level keempat tidak bisa dilakukan. Peningkatan keterampilan yang menjadi salah satu aspek yang berada di level pembelajaran juga tidak dapat dilakukan, karena dari pihak KPI sendiri, perubahan keterampilan bukan merupakan tujuan diselenggarakannya Sekolah P3SPS ini,

sehingga tidak ada materi penunjang perubahan keterampilan yang dilakukan, sehingga evaluasinya pun tidak dapat dilakukan.

Bedasarkan pemaparan data dan beberapa pertimbangan yang ada, penelitian ini akan dilakukan secara evaluatif yang secara umum akan melihat dampak program Sekolah P3SPS melalui gambaran kepuasan, penambahan pengetahuan dan perubahan sikap dengan menerapkan dua level awal model evaluasi Donald L. Kirkpatrick.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah dan model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran hasil evaluasi pelatihan Sekolah P3SPS KPI menggunakan model evaluasi Kirkpatrick pada level reaksi dan level pembelajaran. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran kepuasan peserta Sekolah P3SPS ditinjau dari evaluasi pada tingkat reaksi?
2. Sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta Sekolah P3SPS ditinjau dari evaluasi tingkat pembelajaran?
3. Sejauh mana perubahan sikap peserta Sekolah P3SPS ditinjau dari evaluasi tingkat pembelajaran?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah yang akan dituju seseorang peneliti dalam melakukan penelitian, karena tujuan penelitian akan menjawab pertanyaan penelitian dan akan berhubungan dengan saran penelitian (Kriyantono, 2006, h. 81). Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan peserta Sekolah P3SPS ditinjau dari evaluasi pada tingkat reaksi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta Sekolah P3SPS ditinjau dari evaluasi tingkat pembelajaran.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan sikap peserta Sekolah P3SPS ditinjau dari evaluasi tingkat pembelajaran.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan nantinya, baik dari dalam universitas maupun luar universitas. Hingga saat ini, peneliti melihat bahwa minat akademisi terhadap penelitian evaluatif masih terbatas, terutama untuk penelitian evaluasi, program pelatihan dengan tema komunikasi dan juga etika media. Selain itu, pengembangan model evaluasi Kirkpatrick di universitas sendiri belum pernah dilakukan. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan topik penelitian, baik dari jenis dan model evaluasinya yang belum pernah dilakukan

sebelumnya. Dari sisi teknis metode model evaluasi Kirkpatrick, pengembangan yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menjadi pilihan pada penelitian sejenis berikutnya untuk memperhatikan lebih lagi terkait dengan teknis analisis data yang akan digunakan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran pengembangan bagi KPI sebagai penyelenggara program Sekolah P3SPS dalam konteks level reaksi dan pembelajaran. Hal ini didasari karena hingga saat ini, KPI belum melakukan evaluasi terkait program Sekolah P3SPS yang sudah dilakukan tersebut, baik efek jangka pendek maupun efek jangka panjang. Sehingga harapannya adalah, dengan adanya penelitian ini, hasil yang ada dapat menjadi masukan membangun untuk pengembangan program kearah yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan diadakannya pelatihan.

UMMN